



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5973-5982

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kekuasaan Dalam Politik Islam: Analisis Terhadap Dimensi Kedudukan Hukum Dan Kepribadian

Salamah<sup>1✉</sup>, Efendi<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci,<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara  
Sakti Sungai Penuh

Email : [amah0473@gmail.com](mailto:amah0473@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini membahas pandangan Islam tentang kekuasaan dalam konteks politik. Fokus utama artikel ini adalah konsep kekuasaan secara umum, pandangan Islam terhadap politik, dan hubungan antara kekuasaan dengan politik menurut perspektif Islam. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode riset kepustakaan dengan mengumpulkan data dari literatur yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama serta Imam Mazhab. Metode ini dilengkapi dengan teknik kutipan langsung dan tidak langsung, serta analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam Islam, politik atau siyasah tidak terbatas pada kebijakan dalam institusi terkecil seperti rumah tangga, tetapi mencakup semua aspek kehidupan bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, baik dalam konteks domestik maupun publik, serta dalam dimensi kultural dan struktural, baik secara personal maupun komunal. Pemahaman Islam tentang kekuasaan menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan mengikuti contoh kepemimpinan Rasulullah saw., yang melibatkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pentingnya adanya keterlibatan berbagai ahli dalam bidang masing-masing untuk mencegah kekuasaan yang otoriter dan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan prinsip-prinsip politik yang islami, yaitu dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. sebagai pedoman utama bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, Rasulullah saw. dianggap sebagai teladan yang sempurna bagi semua pemimpin, tidak hanya dalam komunitas Muslim, tetapi juga secara universal bagi semua pemimpin di seluruh dunia.

Kata Kunci: *Kekuasaan, Politik, Islam*

## Abstract

This article discusses Islamic views on power in a political context. The main focus of this article is the concept of power in general, the Islamic view of politics, and the relationship between power and politics from an Islamic perspective. In his research, the author used library research methods by collecting data from relevant literature, including the Al-Qur'an, hadith, and the opinions of ulama and Islamic School Imams. This method is equipped with direct and indirect quotation techniques, as well as qualitative data analysis. The results of the analysis show that in Islam, politics or *siyasa* is not limited to policies in the smallest institutions such as households, but covers all aspects of life together. The aim is to achieve prosperity in this world and the hereafter, both in domestic and public contexts, as well as in cultural and structural dimensions, both personal and communal. The Islamic understanding of power emphasizes that power must be exercised by following the leadership example of the Prophet Muhammad, which involves legislative, executive and judicial powers. It is important to involve various experts in their respective fields to prevent authoritarian and arbitrary power. In this context, Islam teaches Islamic political principles, namely by referring to the Al-Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. as the main guideline for leaders in carrying out their duties. Thus, Rasulullah saw. is considered a perfect role model for all leaders, not only within the Muslim community, but also universally for all leaders around the world.

*Keywords: Power, Politics, Islam*

## PENDAHULUAN

Kekuasaan dalam konteks politik Islam dilihat sebagai suatu aspek yang esensial dalam hubungan kemanusiaan. Ini mencakup dimensi etis yang fundamental dan harus dijalankan dengan bijaksana, merujuk pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai pedoman utama. Kajian ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap politik Islam untuk memastikan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemimpin dan masyarakat lebih bijaksana dan tepat.

Dalam masyarakat Indonesia, kekuasaan tercermin dalam hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup lokal. Hal ini penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Namun, untuk memahami secara menyeluruh tentang politik Islam dan kekuasaan, dibutuhkan analisis yang radikal dan sistematis terhadap persoalan-persoalan ini, termasuk penerapan kritik yang konstruktif terhadap struktur politik yang ada.

Pengkajian politik Islam perlu diperdalam di berbagai lembaga pendidikan Islam untuk menghasilkan pendekatan baru yang lebih inklusif dan etis dalam memahami kekuasaan serta tatanan politik secara luas (Andi, 1998). Hal ini akan membantu menghadapi tantangan modernitas dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam

konteks kontemporer, sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek legal-formal dan nilai-nilai keislaman yang lebih dalam dan relevan.

Kekuasaan, dalam berbagai wujudnya, menjadi fokus perhatian utama dalam konteks politik Islam. Sebagai dimensi sentral dalam tata kelola suatu negara dan masyarakat, pemahaman terhadap kekuasaan dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup aspek kelembagaan dan administratif, tetapi juga menggali akar filosofis dan etis yang mengatur penggunaan kekuasaan. Kajian ini menyoroti bagaimana Islam, sebagai agama dan pandangan hidup yang holistik, menyediakan kerangka kerja untuk mengatur dan menggunakan kekuasaan dengan adil dan berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi Abd al-Baqi, (1991).

Dalam konteks sejarah, Islam tidak hanya memberikan panduan tentang bagaimana pemerintahan harus diorganisir, tetapi juga menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk mempromosikan keadilan, kesejahteraan umum, dan menjaga stabilitas sosial. Analisis terhadap konsep-konsep seperti keadilan sosial, kebebasan beragama, dan partisipasi politik dalam kerangka Islam menjadi penting dalam membentuk pandangan yang komprehensif terhadap kekuasaan.

Selain itu, kekuasaan dalam politik Islam juga melibatkan pertimbangan tentang relasi antara pemerintah dan rakyat, serta tanggung jawab sosial dan moral yang melekat pada pemimpin. Dengan memahami perspektif ini, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana teori politik Islam dapat beradaptasi dengan tantangan-tantangan modern seperti globalisasi, demokratisasi, dan dinamika politik internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep-konsep politik Islam dalam konteks kekuasaan, menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam berperan dalam membentuk struktur politik yang inklusif dan adil, serta memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan politik sehari-hari. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga penting dalam konteks global untuk memahami kontribusi Islam terhadap pemikiran politik universal.

## METODE PENELITIAN

Dalam upaya memudahkan penulis membahas penelitian ini, maka diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang dimaksud. Hal ini akan membantu setiap pembahasan sehingga dengan mudah dapat sesuai dengan pembahasan. Berikut ini metode-metode yang penulis gunakan antara lain:

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (kesejarahan) yang dimaksudkan untuk melihat konsep-konsep kekuasaan dan politik Islam di masa lampau dan Pendekatan syar'iy (hukum Islam) yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana konsep Islam dalam hal kekuasaan politik.

#### Metode pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Data-data pustaka yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisa, selanjutnya mengambil kesimpulan secara sistematis

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sumber-Sumber Kekuasaan

Ada pun sumber kekuasaan itu sendiri ada 3 macam,yaitu:

1. Kekuasaan formal atau Legal (French & Raven 1959). Contohnya komandan tentara, kepala dinas, presiden atau perdana menteri. Kendali atas sumber dan ganjaran (French & Raven 1959). Contoh : Majikan yang menggaji karyawannya, pemilik sawah yang mengupah buruhnya, kepala suku atau kepala kantor yang dapat memberi ganjaran kepada anggota atau bawahannya.
2. Kendali atas hukum (French & Raven 1959). Kepemimpinan yang didasarkan pada rasa takut. Contohnya preman-preman yang memunguti pajak dari pemilik toko. Para pemilik toko informal menuruti kehendak para preman itu karena takut mendapat perlakuan. Demikian pula anak kelas satu SMP yang takut pada senior kelasnya yang galak dan suka memukul sehingga kehendak seniornya itu selalu dituruti.
3. Kendali atas informasi (Pettigrew, 1972). Siapa yang menguasai informasi dapat menjadi pemimpin. Contohnya orang yang paling tahu jalan diantara serombongan pendaki gunung yang tersesat akan menjadi seorang pemimpin. Ulama akan menjadi pemimpin dalam agama. Ilmuan menjadi pemimpin dalam ilmu pengetahuan.
4. Kendali ekologi (lingkungan). Sumber kekuasaan ini dinamakan juga perekrayaan situasi . Meliputi : Kekuasaan Berdasarkan Kedudukan memiliki pengaruh potensial yang berasal dari kewenangan yang sah karena kedudukannya dalam organisasi terdiri dari: Kewenangan Formal dan Kekuasaan Pribadi. Kewenangan Formal, yaitu kewenangan yang mengacu pada hak prerogatif, kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial.

Kontrol terhadap sumber daya dan imbalan, merupakan kontrol dan penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan terkait dengan kedudukan formal. Makin tinggi posisi seseorang dalam hirarki organisasi, makin banyak kontrol yang dimiliki orang tersebut terhadap sumber daya yang terbatas. Kontrol terhadap hukuman merupakan kapasitas untuk mencegah seseorang memperoleh imbalan.. Kontrol terhadap informasi menyangkut kontrol terhadap akses terhadap informasi penting maupun kontrol terhadap distribusinya kepada orang lain. Kontrol ekologis menyangkut kontrol terhadap lingkungan fisik, teknologi dan metode pengorganisasian pekerjaan

Kekuasaan yang bersumber pada kepribadian Berasal dari sifat-sifat pribadi.

Keahlian atau keterampilan (French & Raven 1959). Contohnya pasien-pasien di rumah sakit menganggap dokter sebagai pemimpin karena dokterlah yang dianggap sebagai ahli untuk menyembuhkan penyakitnya. Persahabatan atau kesetiaan (French & Raven 1959). Sifat dapat bergaul, setia kawan atau setia kepada kelompok dapat merupakan sumber kekuasaan sehingga seseorang dianggap sebagai pemimpin. Contohnya pemimpin yayasan panti asuhan dipilih karena memiliki sifat seperti Ibu Theresa. Kharisma (House,1977). Ciri kepribadian yang menyebabkan timbulnya kewibawaan pribadi dari pemimpin juga merupakan salah satu sumber kekuasaan dalam proses kepemimpinan.

Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber kekuasaan berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hirarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Pengaruh potensial yang melekat pada keunggulan individu terdiri dari: Kekuasaan keahlian (*expert power*), Kekuasaan kesetiaan (*referent power*), dan Kekuasaan karisma. Kekuasaan keahlian (*expert power*) merupakan kekuasaan yang bersumber dari keahlian dalam memecahkan masalah tugas-tugas penting. Semakin tergantung pihak lain terhadap keahlian seseorang, semakin bertambah kekuasaan keahlian (*expert power*) orang tersebut. Kekuasaan kesetiaan (*referene power*) merupakan potensi seseorang yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi permintaan orang tersebut. *Referente power* terkait dengan keterampilan interaksi antar pribadi, seperti pesona, kebijaksanaan, diplomasi dan empati.

Maksud dari kekuasaan kesetiaan adalah sebuah potensi dimiliki oleh seseorang yang menjadikannya dikagumi sama orang lain, sehingga pengaruh darinya terhadap orang lain dengan bijaksana setiap orang yang dipengaruhinya akan melaksanakan dengan sendirinya.

Kekuasaan yang bersumber pada politik

Kendali atas proses pembuatan keputusan (Preffer & Salanick, 1974). Ketua menentukan apakah suatu keputusan akan dibuat dan dilaksanakan atau tidak. Koalisi (Stevenson, Pearce & Porter 1985). Ditentukan hak dan wewenang untuk membuat kerjasama dalam kelompok. Partisipasi (Preffer, 1981). Pemimpin yang mengatur partisipasi dari masing-masing anggotanya. Institusionalisasi. Pemimpin agama menikahkan suami istri. Notaris atau hakim menetapkan berdirinya suatu perusahaan.

#### *Bentuk-Bentuk Kekuasaan*

Gagasan tradisional tentang kekuasaan difokuskan pada individu dan pelaksanaan kekuasaannya. Kekuasaan adalah sesuatu yang dipegang dan ditangani manusia, berdasarkan sumber-sumber kekuasaan tertentu. French dan Raven (1959) menyatakan bahwa A dapat memiliki kekuasaan atas B berdasarkan pada lima jenis kekuasaan. Dasar-dasar kekuasaan ini dibedakan oleh arti tindakan A terhadap B dan hubungan yang mereka hasilkan. Kekuasaan memberi ganjaran (*Reward Power*) adalah kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Tentu hal ini bisa terlaksana dalam konteks bahwa sang pemimpin mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahannya. Penghargaan bisa berupa pemberian hak otonomi atas suatu wilayah yang berprestasi, promosi jabatan, uang, pekerjaan yang lebih menantang dsb. Contoh: Apabila seorang pegawai dapat bekerja melebihi target, maka karyawan tersebut akan mendapat insentif berupa uang. Kekuasaan yang memaksa (*Coercive Power*) yakni kekuasaan yang didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Yang dipimpin juga menyadari bahwa apabila dia tidak mematuhi, akan ada efek negative yang bisa timbul. Pemimpin yang bijak adalah yang bisa menggunakan kekuasaan ini dalam konotasi pendidikan dan arahan yang positif kepada anak buah. Bukan hanya karena rasa senang-tidak senang, ataupun faktor-faktor subjektif lainnya. Contoh: seorang pajurit datang terlambat saat bekerja, maka komandannya akan member hukuman.

Kekuasaan yang sah (*Legitimate Power*) yakni kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang (authority) kepada seorang pemimpin untuk memberi perintah, yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak dan anak buahnya. Bisa berupa kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, seorang kepala sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seorang pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Contoh: seorang dosen akan mulai memberikan materi saat isi kelas diam

dan tenang, apabila di dalam kelas masih gaduh maka dosen tidak mau mengajar. Kekuasaan referen (*Referent Power*) adalah kekuasaan yang timbul karena kharisma, karakteristik individu, keteladanan atau kepribadian yang menarik. Logika sederhana dari jenis kekuasaan ini adalah apabila saya mengagumi dan memuja anda, maka anda dapat berkuasa atas saya. Contoh: dalam suatu partai politik, si B terpilih menjadi ketua partai tersebut karena ia dipandang sebagai pribadi yang baik, bersahaja dan mengayomi.

Kekuasaan ahli (*Expert Power*) yakni kekuasaan yang berdasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kemahiran konseptual dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan dalam kerangka sang pengikut memerlukan kepakarannya. Kekuasaan kepakaran bisa terus eksis apabila ditunjang oleh *referent power* dan *legitimate power*. Contoh: seorang pasien percaya pada hasil diagnose dokter atas penyakit yang dideritanya, seseorang percaya pada seorang ilmuwan pada bidang, karena ilmuwan tersebut telah membuktikan hasil penelitiannya. Sementara itu, French dan Raven (Gary A Yukl, 1994) mengidentifikasi ada lima bentuk kekuasaan yang dirasakan mungkin dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kekuasaan ganjaran merupakan suatu kekuasaan yang didasarkan atas pemberian harapan, pujian, penghargaan atau pendapatan bagi terpenuhinya permintaan seseorang pemimpin terhadap bawahannya. Kekuasaan paksaan yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas rasa takut, seorang pengikut merasa bahwa kegagalan memenuhi permintaan seorang pemimpin dapat menyebabkan dijatuhkannya sesuatu bentuk hukuman.

### *Pengertian Politik Islam*

Politik berasal dari kata *politics* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politisc* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah- masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.

Istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *politea* yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *politea*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari kedua karya inilah dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang

dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat.

Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terrealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.<sup>37</sup> Sedang menurut Abdur Rahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kullli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz'iy* dalam al- Qur'an dan Sunnah.

Beberapa pakar yang juga mendefinisikan politik sebagai berikut :

1. Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan Allah tidak mewahyukannya.

*Siyasah* dalam definisi Ibnul Qayyim ini adalah *siyasah* yang bersifat khusus, yaitu *siyasah* yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan dan syariat, atau dikenal dengan *siyasah syar'iyah* atau *fikih siyasah*. *Siyasah syar'iyah* adalah *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.

2. Abdul Qadim Zallum, politik/*siyasah* adalah mengatur urusan umat, dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi –melakukan muhasabah terhadap- pemerintah dalam melakukan tugasnya.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, penulis mengambil makna politik dalam arti yang luas. Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun –seperti rumah tangga. Politik atau *siyasah* adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.



## SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini adalah dalam perspektif politik Islam, kekuasaan dipahami melalui berbagai sumber yang mencakup dimensi formal, hukum, dan informasi menurut teori French & Raven (1959), serta aspek kepribadian seperti keahlian, kesetiaan, dan kharisma. Islam menekankan bahwa penggunaan kekuasaan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum, menghindari penyalahgunaan dan mempromosikan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menyoroti pentingnya integritas moral dan etika dalam pemerintahan serta interaksi sosial, memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak untuk kepentingan diri semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Baqi, Muhammad Fu"ad. Mu"jam al-Mufahras li Alfad al-Qur"an. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Bahnasawi, Salim Ali. Wawasan Sistem politik Islam, Terj. Mustolah Maufur. Cet 1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Al-Baqy, Muh. Fu"ad „Abd. Mu"jam al-Mufahras li Alfad Al-Qur"an. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Ali, A. Mukti. Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Al-Maududi, A"la, Abul, Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam, Terj. Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Syuwarabi, Abdul Hamid. al-Huq-q al-Siyasiyyah li al-Mar"ah f<sup>3</sup> al-Islam. Iskandariah: Dar Mansya"ah al-Ma"arif, t.th.
- Andi Rasdiyanah. Konsep Etika Politik dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar, "Makalah", disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke- 33 IAIN Alauddin Makassar, November 1998.
- Arkoun, Mohemmed, Rethinking : Common Questions, Uncommon Answers, Yudian W.Asmin (Penterjemah), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996. Bahri, Fadli. al-Akhkam, al-Sulthonia Al-Mawardi, Terj., Jakarta: Darul Falah. Cet I, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: KonstitusiPress, 2005.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan. Ta"ahur- Akhlaq al-Nisa, terj. Chairul Halim dengan Judul Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Azhar, Muhammad, Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

- Budiarjo, Miriam. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putera, 1989.
- Ditjen Bagais. Jejak-Jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia. Jakarta: Ditperta, 2004.
- el-Na, Muhammad, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam, Terj Anshori Tadjib, Surabaya, Bina Ilmu, 1983.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir. Pemikiran Politik Al-Qur'an. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ibn Khaldun, As-Siyasah asy-Syari'ah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah, Dar al-Kutub al-'Arabiyat, Bairut, 1966.
- Iqbal, M., Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet I, 2001.
- Jaelani, Abdul Kadir, Negara Ideal menurut Konsepsi Islam, Surabaya: PT. Bina Ilmu Cet I, 1995.
- Lubis, Todung Mulya. Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Azasi di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. Islam dan Masalah Kenegaraan. Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1986.
- Madjid, Nurcholish, Agama dan Negara Dalam : Sebuah Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni, Makalah Seri KKA Nomor 55/Tahun V/ 1991.
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Pulungan, J. Suyuthi. Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Ed.I. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fazlur, Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago and London : University of Chicago Press, 1982.